

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mubyarto (2004), kemiskinan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Di Indonesia, kemiskinan menjadi tantangan serius meskipun terjadi penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam kebutuhan dasar untuk hidup layak, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Selain itu, menurut Sembiring et al., (2003), mengatakan bahwa kemiskinan dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi sangat terbatas. Banyak penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan sebagian besar lainnya bertahan dengan pendapatan yang tergolong rendah. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, seluruh masyarakat mengharapkan adanya program yang ideal dan dapat diterapkan di berbagai wilayah. Namun, kenyataannya program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini cenderung diseragamkan tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal. Banyak program lebih menitikberatkan pada pencapaian target tanpa memperhatikan

potensi. Seringkali, program tidak berjalan tidak sesuai harapan dan mengalami kegagalan. Hal ini biasanya terjadi karena berbagai kondisi yang tidak diantisipasi dengan baik perencanaan maupun pelaksanaan.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi masalah kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin masih tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan. Masalah mendasar yang terjadi adalah ketidaksempurnaan penerapan teori pembangunan ekonomi di lapangan, yang menyebabkan kemiskinan menjadi kondisi yang persisten dan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya.

Tabel 1.1

Angka Kemiskinan Jawa Tengah

Tahun	Presentase
2020	11,41
2021	11,79
2022	10,93
2023	10,77
2024	10,47

Sumber: (BPS, Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2024, 2024)

Pada tabel 1.1 data kemiskinan Jawa Tengah 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Terjadinya kenaikan kemiskinan pada tahun 2021 menjadi indikasi bahwa ketahanan ekonomi masyarakat masih sangat rentan

terhadap guncangan, meskipun secara agregat pertumbuhan ekonomi tercatat positif. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro saja tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara drastis jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian harga, serta pemerataan akses terhadap teknologi dan informasi. Masalah mendasar yang terjadi adalah ketidaksempurnaan penerapan teori pembangunan ekonomi di lapangan, yang menyebabkan kemiskinan menjadi kondisi yang persisten dan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya.

Kondisi tersebut semakin terlihat jelas ketika membandingkan rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah dengan provinsi-provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, sebagaimana tertera pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Angka Kemiskinan Per-Provinsi Di Pulau Jawa

No	Provinsi	Rata-Rata
1	DIY	11,6
2	Jawa Tengah	10,884
3	Jawa Timur	10,566
4	Jawa Barat	7,892
5	Banten	6,248
6	DKI Jakarta	4,51

Sumber: (BPS, 2025)

Pada tabel 1.2 berdasarkan data rata-rata presentase kemiskinan tahun 2020-2024, Jawa Tengah menempati urutan kedua tertinggi di Pulau Jawa dengan angka 10,884 persen. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang berada di urutan ketiga dengan rata-rata 10,566 persen, terdapat selisih angka kemiskinan sebesar 0,318 poin presentase. Fakta ini menarik sekaligus menjadi masalah yang

perlu diteliti lebih lanjut. Padahal kalau dilihat dari potensi ekonomi, kekayaan alam, dan jumlah penduduk, kedua provinsi ini sebenarnya hampir sama dan sama-sama penting bagi perekonomian nasional. Namun, adanya perbedaan angka kemiskinan ini membuktikan bahwa cara pembangunan di Jawa Tengah belum seefektif yang dilakukan di Jawa Timur. Kemungkinan besar penyebabnya adalah perekonomian Jawa Tengah masih terlalu bergantung pada sektor pertanian dan usaha kecil. Padahal, pendapatan dari sektor tersebut biasanya rendah dan tidak menentu. Belum lagi ada perbedaan kondisi yang cukup jauh antara daerah kota dan desa, sehingga membuat angka kemiskinan di sini masih bertahan tinggi.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan tingkat kemiskinan yang agregat dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah belum sepenuhnya merata, dan pada sebagian daerah masih tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan membangun berbagai sektor, termasuk ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi tolok ukur keberhasilan dan kemajuan suatu wilayah, yang tujuannya utama adalah membuka lebih banyak kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Menurut Kristanto (2014), tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar kemungkinan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena individu yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 1.3

Jumlah Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)

Tahun	Presentase
2020	6,48
2021	5,95
2022	5,57
2023	5,13
2024	4,78

Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan tabel 1.3, terlihat bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran tercatat sebesar 6,48 persen, kemudian turun menjadi 5,95 persen pada tahun 2021, dan penurunan ini terjadi secara beruntun hingga tahun 2024 menjadi 4,78 persen.

Menurut teori ekonomi dari Sukirno (2016) dan konsep lingkaran kemiskinan Nurkse (1953), hubungan antara pengangguran dan kemiskinan bersifat searah dan berbanding lurus. Teori ini menjelaskan bahwa pekerjaan adalah sumber utama pendapatan masyarakat. Semakin sedikit orang yang menganggur, berarti semakin banyak orang yang punya penghasilan, sehingga

kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup semakin terjamin dan angka kemiskinan pasti akan turun drastis.

Jika melihat hasil penelitian terdahulu, hubungan kedua variabel ini juga masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten. Penelitian dari Pratiwi (2020) dan Setiawan (2022) menemukan hasil yang searah dengan teori, di mana pengangguran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, jika pengangguran turun, kemiskinan pasti ikut turun. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Wibowo (2021) dan Anwar (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana penurunan angka pengangguran tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan yang berarti. Perbedaan hasil dari berbagai penelitian inilah yang menjadi alasan mengapa topik ini masih perlu dikaji ulang di wilayah dan waktu yang berbeda.

Kondisi yang terjadi di Jawa Tengah justru sejalan dengan pandangan dari penelitian kedua. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda dan tidak sesuai dengan teori awal maupun hasil penelitian yang umum. Penurunan angka pengangguran yang cukup besar ternyata tidak diikuti penurunan kemiskinan yang setara. Hal ini mengindikasikan bahwa keterkaitan antara kedua variabel tersebut terganggu oleh faktor kualitas pekerjaan. Upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan memang saling berkaitan erat. Masyarakat yang bekerja tentu akan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan terpenuhi, risiko mereka jatuh miskin akan semakin kecil. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah pengangguran, seharusnya angka kemiskinan juga ikut turun.

Kenyataannya, penurunan jumlah pengangguran ternyata tidak langsung membuat kemiskinan menurun. Hal ini terjadi karena sebagian besar pekerja terserap di sektor informal, yang biasanya punya produktivitas rendah, penghasilan tidak menentu, dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini menciptakan fenomena di mana masyarakat sudah bekerja namun tetap miskin. Akibatnya, secara hitungan statistik jumlah pengangguran memang berkurang, tapi angka kemiskinan masih bertahan tinggi karena penghasilan yang didapat belum cukup untuk hidup layak.

Selain faktor pengangguran, variabel lain yang diduga kuat memengaruhi tingkat kemiskinan adalah inflasi. Inflasi menggambarkan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan angka inflasi di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Tahun	Inflasi
2020	1,56
2021	1,70
2022	5,63
2023	2,89
2024	1,67

Sumber: (BPS, Inflasi Tahunan (Y-on-Y) 38 Provinsi (2022=100) (Persen) 2024, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat inflasi di Jawa Tengah selama periode 2020-2024 menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi cukup tajam. Pada masa pandemi COVID-19, inflasi tercatat rendah sebesar 1,56 persen pada tahun 2020 dan sedikit naik menjadi 1,70 persen pada tahun 2021 seiring lemahnya

permintaan masyarakat. Namun, kondisi berubah drastis pada tahun 2022 dimana inflasi melonjak tinggi mencapai 5,63 persen akibat tekanan kenaikan harga bahan pangan dan energi. Selanjutnya, inflasi kembali terkendali menjadi 2,89 persen pada tahun 2023 dan 1,67 persen pada akhir tahun 2024.

Secara teoritis, inflasi dapat memengaruhi tingkat kemiskinan melalui perubahan daya beli masyarakat. Menurut Sukirno (2016), kenaikan harga barang dan jasa secara umum dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup apabila peningkatan pendapatan tidak mampu mengimbangi laju inflasi. Namun, dampak inflasi terhadap kemiskinan tidak selalu menunjukkan arah yang sama. Pada kondisi tertentu, inflasi yang masih berada pada tingkat ringan dan terkendali dapat mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, hubungan antara inflasi dan kemiskinan masih menjadi perdebatan dan perlu dibuktikan secara empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaqiqi (2021) dan Inayah (2023) menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori konvensional. Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kondisi ini dapat terjadi apabila kenaikan harga didominasi oleh meningkatnya harga hasil produksi masyarakat, seperti produk pertanian dan usaha mikro, sehingga pendapatan yang diterima produsen dan pelaku usaha meningkat lebih besar dibandingkan kenaikan pengeluaran yang harus mereka tanggung. Dengan demikian, inflasi yang masih berada pada tingkat ringan dan terkendali dapat

mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi serta berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.

Kondisi riil di Jawa Tengah menunjukkan fenomena yang menarik. Pada tahun 2022, ketika inflasi meningkat hingga mencapai 5,63 persen, persentase penduduk miskin justru mengalami penurunan dari 11,79 persen pada tahun 2021 menjadi 10,93 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan kemiskinan tidak selalu searah sebagaimana dijelaskan dalam teori konvensional, sehingga perlu dilakukan pengujian empiris untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Hal ini menandakan adanya pola ekonomi khas Jawa Tengah, di mana sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian dan usaha mikro. Posisi mereka yang dominan sebagai produsen dan pelaku usaha membuat dampak inflasi terasa berbeda dibandingkan masyarakat yang hanya berperan sebagai konsumen. Ketika harga-harga naik, nilai jual hasil produksi mereka juga ikut meningkat, sehingga pendapatan yang diterima bertambah dan mampu memperbaiki taraf hidup. Fenomena hubungan yang berkebalikan ini di mana kenaikan inflasi justru berpotensi menurunkan kemiskinan menjadi masalah utama yang perlu dibuktikan secara statistik dalam penelitian ini, untuk memastikan apakah inflasi di Jawa Tengah bersifat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Faktor lain yang menjadi faktor terjadinya kemiskinan bagi pembangunan masa kini adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-

TIK). IP-TIK menggambarkan seberapa jauh perkembangan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini mencakup aspek akses, penggunaan, serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Berikut perkembangan nilai IP-TIK di Jawa Tengah periode 2020-2024.

Tabel 1.5

**Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(IP-TIK)**

Tahun	Indeks
2020	5,74
2021	5,82
2022	5,83
2023	5,86
2024	5,98

Sumber: (BPS, Indeks Pembangunan TIK 2024)

Berdasarkan tabel 1.7, nilai IP-TIK di Jawa Tengah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 54,12, kemudian terus mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai angka 63,28 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam hal akses, pemanfaatan, serta keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan perluasan jaringan infrastruktur digital yang terus didorong oleh pemerintah.

Secara teori, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dijelaskan melalui Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Romer (1986) serta pandangan Todaro dan Smith (2011). Teori tersebut menjelaskan

bahwa teknologi dan pengetahuan merupakan faktor penting dalam mendukung proses pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dipandang mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam berbagai kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan informasi dan inovasi. Namun, besarnya pengaruh perkembangan teknologi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat berbeda-beda, tergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Alfy (2023) dan Pratama (2024) menemukan bahwa IP-TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Kondisi di Jawa Tengah menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji. Meskipun nilai IP-TIK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dan penurunannya cenderung berlangsung secara bertahap. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian empiris untuk mengetahui apakah perkembangan IP-TIK di Jawa Tengah telah efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan selama periode penelitian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai IP-TIK belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan di Jawa Tengah. Fenomena ini diduga berkaitan dengan adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara produktif. Meskipun akses terhadap teknologi terus berkembang, pemanfaatannya untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu berlangsung secara merata. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui apakah perkembangan IP-TIK di Jawa Tengah telah berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan selama periode penelitian.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul, Pengaruh Pengangguran, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2010-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengangguran, inflasi, dan IP-TIK secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah 2010-2024.
2. Bagaimana pengaruh pengangguran, inflasi, dan IP-TIK secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah 2010-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengaruh pengangguran, inflasi, dan IP-TIK secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah 2020-2024.
2. Menganalisis pengaruh pengaruh pengangguran, inflasi, dan IP-TIK secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Pengambilan kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna didalam memahami faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2. Ilmu pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. lokasi ini dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki karakteristik keragaman kondisi sosial ekonomi yang cukup tinggi antar kabupaten/kota. Seluruh data yang digunakan dalam analisis merupakan data sekunder yang bersumber

dari publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait lain yang relevan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini mencakup periode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan pada tahun 2025-2026, sedangkan periode data yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2010-2024, sesuai dengan rentang waktu variabel dianalisis.

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

[illegible]